

Permasalahan Tinggat Ketenagakerjaan terhadap Pengangguran di Indonesia

Nikmah Dalimunthe¹, Ucha Saleha Nasution²

^{1,2} Prodi Syariah, Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara

nikmahdalimunthe5@gmail.com¹, uchasalehanst02@gmail.com²

ABSTRACT

This article aims to find out the problems of Indonesian workers related to the response. Reducing hostilities and creating new workspaces is critical to accelerating a country's economic development. The key to success in business is creating markets for the skills of the workforce. Developments in Indonesian legislation have not facilitated implementation of its objectives by the private sector and the international community. Many factors, such as lengthy permits, high costs, and extended hours, can hinder the development of high-quality field work. A stronger emphasis on community is essential in the fight against crime. Furthermore, the importance of groups in solving development problems by creating and maintaining work spaces cannot be overstated. Public property regulations fall under the formal and informal aspects of community law.

Keywords: *Employment, unemployment, Indonesia*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tenaga kerja Indonesia yang terkait dengan respons. Pengurangan permusuhan dan penciptaan ruang kerja baru sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Kunci sukses dalam bisnis adalah menciptakan pasar untuk keahlian angkatan kerja. Perkembangan legislasi Indonesia belum memfasilitasi implementasi tujuannya oleh sektor swasta dan masyarakat internasional. Banyak faktor, seperti izin yang panjang, biaya tinggi, dan jam kerja yang diperpanjang, dapat menghambat pengembangan kerja lapangan berkualitas tinggi. Penekanan yang lebih kuat pada komunitas sangat penting dalam perang melawan kejahatan. Selanjutnya, pentingnya kelompok dalam memecahkan masalah pembangunan dengan menciptakan dan memelihara ruang kerja tidak bisa dilebih-lebihkan. Peraturan properti publik berada di bawah aspek formal dan informal hukum masyarakat.

Kata Kunci : *Ketenagakerjaan, pengangguran, Indonesia*

PENDAHULUAN

Bahkan saat ini, masalah penyusutan dan korupsi masih menjadi prioritas utama di sebagian besar negara di dunia, terutama negara berkembang. Kedua masalah ini terkait erat; masing-masing berkontribusi pada penciptaan masalah dualistik lainnya. Dualisme semacam ini muncul ketika pemerintah gagal memanfaatkan secara efektif keuntungan dari penyelesaian kedua masalah tersebut dan mengurangi efek negatif yang ditimbulkannya. Namun, jika pemerintah mampu memanfaatkan kekuatan tenaga kerja yang tersedia, maka dualisme masalah tidak akan terjadi, bahkan mungkin berdampak positif pada laju pembangunan. Hal sebaliknya terjadi jika pemerintah tidak mampu memanfaatkannya, yang akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat secara positif, tenaga kerja terampil merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Namun, kenaikan biaya tenaga kerja dari sektor lain menimbulkan masalah ekonomi yang sulit dipecahkan oleh para pembuat kebijakan. Akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai akibat bertambahnya jumlah penduduk, tenaga kerja yang ada tidak termanfaatkan secara maksimal sehingga menimbulkan budaya geng. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia dilaporkan tertinggi keempat di dunia berdasarkan data yang dipublikasikan baru-baru ini (World Bank, 2013). Artinya, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Menurut data BPS (2014), jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 122.742.601, dengan jumlah tersebut meningkat menjadi 125.316.911 pada tahun 2014.

Jika pemerintah ingin berhasil melewati proses pembangunan tanpa cedera, ia perlu memaksimalkan efisiensi tenaga kerjanya. Jika tidak, semakin banyak pekerja yang tidak produktif dalam perekonomian akan menjadi beban dan hambatan. Selain menjadi penghambat ekonomi suatu negara, kekerasan geng juga digunakan sebagai proksi kesehatan pasar tenaga kerja. Kemakmuran relatif pengangguran sering dilihat sebagai tanda prestise suatu negara, tetapi sebaliknya juga benar.

Namun kenyataannya belum menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang sebenarnya. Di sini, konsep gangbang mengacu pada orang-orang yang telah memasuki kelompok usia kerja (15–65) dan sedang mencari pekerjaan, bersiap untuk meluncurkan bisnis, mengalami kesulitan keuangan, atau menahan tawaran pekerjaan tetapi menunggu untuk mulai bekerja. Upaya pemerintah untuk mengurangi kejahatan di negeri ini secara umum berhasil, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meskipun tidak semuanya efektif. Menurut data BPS RI selama satu dekade terakhir, telah terjadi penurunan tingkat pengangguran yang signifikan di Indonesia, dengan tingkat pengangguran turun dari 10,3 persen penduduk usia kerja pada tahun 2005 menjadi 7,0 persen penduduk usia kerja di 2015. Namun, ada beberapa hambatan yang membuat produktivitas area kerja tidak mencapai potensi maksimalnya. Menurut laporan Bank Dunia dan Korporasi Keuangan Internasional tahun 2012 tentang melakukan bisnis di Indonesia, kurangnya tenaga kerja terampil, infrastruktur yang buruk, dan peraturan yang tidak konsisten semuanya menjadi hambatan untuk memperluas angkatan kerja Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purna dkk (2010). Penipisan tenaga kerja tinggi karena bidang pendidikan dan bisnis belum belajar untuk terhubung dengan baik satu sama lain, dan masih banyak masalah lain yang belum terselesaikan. . Karena itu, batasan masalah yang diajukan adalah bagaimana Permasalahan Tinggat Ketenagakerjaan Terhadap Pengangguran Di Indonesia?

TINJAUAN LITERATUR

Ketenagakerjaan

Karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan ekonomi, fokus pada tenaga kerja menjadi sangat penting. Banyak orang tertarik dengan topik-topik mengenai kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, baik yang dibahas di tingkat nasional maupun daerah. Peningkatan investasi dan kebijakan ekonomi yang efisien sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi baru diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru. Menurut pekerjaan BPS tentang teori ketenagakerjaan, digunakan Konsep Angkatan Kerja Standar (juga dikenal sebagai Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merekomendasikan dan mendukung pendekatan ini. Secara khusus, penduduk usia kerja dan bukan usia kerja dibedakan. Orang sekarang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan usia kerja mereka: mereka yang berada dalam angkatan kerja dan mereka yang tidak. Tenaga kerja terdiri dari warga pekerja keras dan birokrat yang menganggur. Namun, kelompok kerja tidak boleh mencakup orang-orang yang, selama periode referensi, tidak aktif secara ekonomi karena alasan apa pun (pelajar, orang tua rumah tangga, pensiunan, penerima deposito bank dan pembayaran bunga, orang yang menerima tunjangan pengangguran, dan sebagainya).

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1962) mendefinisikan penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai mereka yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk mereka yang saat ini tidak bekerja tetapi bersedia bekerja jika diberi kesempatan. Orang yang bekerja adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan bentuk pendapatan atau keuntungan, meskipun hanya satu jam dari minggu sebelumnya. Pekerjaan selama jam itu harus berjalan tanpa istirahat atau interupsi.

Pengangguran

Istilah "pengangguran" mengacu pada seseorang yang merupakan bagian dari angkatan kerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang menguntungkan. Isu terpenting dalam ekonomi makro adalah polusi, yang mencegah pendapatan nasional dan pertumbuhan populasi mencapai potensinya.

Pengangguran umumnya dipahami sebagai gangguan pada bagian-bagian kerja suatu sistem. Definisi di atas memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan respons ke dalam tiga kategori besar: Pertama, "Pengangguran Terselubung" mengacu pada individu usia kerja yang tidak melakukan upaya terbaik mereka dalam pekerjaan karena berbagai faktor; Kedua, tenaga kerja setengah menganggur adalah tenaga kerja yang kinerjanya tidak maksimal karena tidak tersedianya tempat kerja; biasanya, ini mengacu pada pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Ketiga, pengangguran terbuka mengacu pada pekerja yang benar-benar menganggur dan tidak hanya menganggur untuk saat ini. Ada banyak kecelakaan

jenis ini karena orang masih belum mendapatkan pekerjaan meskipun sudah berusaha sebaik mungkin.

METODE PENELITIAN

Studi ini dari berbagai Studi Kasus; menurut Depdikbud (dalam Yatim Riyanto, 2007:108), studi kasus adalah “penelitian yang dirancang untuk mempelajari penyelidikan mendalam terhadap unit-unit sosial tertentu, termasuk individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat”. Menurut Creswell dan Cralk (Creswell, 2008;552), pendekatan penelitian metode campuran adalah prosedur yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi empiris untuk lebih memahami masalah penelitian yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan dalam penyelidikan ini.

HASIL PEMBAHASAN

Setiap negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah yang sama dengan ketenagakerjaan-pengangguran dan kemiskinan. Kedua hal ini saling berhubungan satu sama lain. Masalah di tempat kerja dapat menyebabkan hilangnya produktivitas, begitu pula sebaliknya. Di Indonesia, alat-alat kimia dapat ditemukan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Namun, secara anekdot, kasus kejahatan terkait bahan kimia lebih sering terjadi di daerah pedesaan daripada di pusat kota. Ada beberapa kemerosotan ekonomi yang signifikan dalam sejarah panjang Indonesia. Termasuk krisis 1965 dan krisis ekonomi 1997. Dalam kasus terbaru, masalah terkait kimia telah meningkat secara signifikan. Saat itu, jumlah orang keturunan campuran melejit dari perkiraan sebelumnya 25 miliar menjadi 50 miliar. Sebuah angka yang benar-benar fantastis. Meskipun ada sekitar 200 miliar orang Indonesia pada saat itu. Artinya, jumlah umat Islam di Indonesia telah mencapai 25% dari total jumlah penduduk.

Potensi Tenaga kerja dan Pengangguran di Indonesia

a) Bonus demografi

Populasi yang berkembang dapat dilihat sebagai keuntungan bagi upaya pembangunan suatu negara, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dan menghambat kemajuan. Bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah perkembangan suatu negara. Jika dimanfaatkan, ini menjadi peluang emas untuk mempercepat pembangunan. Namun, kebalikannya berlaku jika suatu negara tidak dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik. Berdasarkan data BPS, terlihat jelas bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2025. Dimanapun kita berada pada tahun tersebut, usia otot dan tenaga kerja kita semakin berkurang, dan itu menunjukkan tantangan unik tersendiri dalam memanfaatkannya.

Globalisasi

Efek dari penyebaran globalisasi di seluruh dunia pada ekonomi di seluruh dunia. Dalam dan dari dirinya sendiri, globalisasi mengacu pada proses dimana ekonomi dan perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia menjadi terintegrasi ke dalam satu pasar supranasional. Perekonomian semakin tidak stabil akibat globalisasi. Sementara itu, gelombang globalisasi yang melahirkan TTA, WTO, NAFTA, dan perjanjian lainnya hanya akan semakin kuat. Mengingat lokasi Indonesia yang strategis, jumlah penduduk yang besar, dan taraf hidup yang tinggi, pengembangan angkatan kerja negara menghadirkan peluang dan tantangan.

Permasalahan Tenaga Kerja dan Pengangguran di Indonesia

Jika ditelisik lebih dalam, ternyata sumber dari semua masalah ketenagakerjaan nasional adalah kurangnya semangat bersaing. Menurut statistik (Susenas, 2012), pada tahun 2014 hanya 9,87% tenaga kerja Indonesia yang lulus dari universitas, sementara 91,2% hanya menyelesaikan sekolah menengah melalui Undang-Undang Pendidikan Teknik dan Keaksaraan Indonesia (SLTAE). Bagi mereka yang ingin berinvestasi di Indonesia, informasi yang disajikan di sini akan membantu memperjelas bahwa sektor manufaktur (termasuk pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik) memiliki ruang pertumbuhan terbesar di negara ini. Karena hanya industri manufaktur berbiaya rendah yang menguntungkan di pasar saat ini, di mana tenaga kerja terbatas, pekerja memiliki pendidikan terbatas, dan bahan mentah murah. Sementara investor ini masih perlu membayar untuk pelatihan karyawan, biaya terkait lebih rendah daripada industri padat modal. Selama hampir 25 tahun, pemerintah Indonesia mempercayai investor jenis ini sebelum dibuktikan oleh kenyataan pahit bahwa jenis bisnis inilah yang paling ingin direlokasi.

Merelokasi bisnis ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, peraturan yang lebih longgar, dan surga pajak yang lebih menguntungkan. Karena sangat mudah bagi mereka untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, mereka dianugerahi medali "industri bebas kaki". Ketika periode reformasi Indonesia dimulai pada tahun 1998, negara melakukan upaya bersama untuk meratifikasi semua konvensi dasar ILO, termasuk yang berkaitan dengan kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi di tempat kerja, usia di mana anak-anak dapat mulai bekerja, dan larangan bekerja di lingkungan yang berbahaya. Selain itu, kebijakan politik demokratisasi yang baru telah memberikan keyakinan kepada investor bahwa demokrasi baru akan selalu diikuti dengan pemberlakuan undang-undang baru yang melindungi warga negara dan memperluas kesejahteraan mereka. Jika hal ini terjadi, biaya tambahan (baik langsung maupun tidak langsung) akan meningkat sebagai akibat langsungnya.

Jika sebuah perusahaan masih dapat memenuhi kebutuhan setelah kenaikan biaya operasional ini, ia akan berusaha melakukannya; Namun, jika keunggulan kompetitifnya semata-mata terdiri dari tenaga kerja yang murah dan peraturan yang longgar, ia akan dengan cepat membuka toko di negara yang menyediakan

infrastruktur bisnis yang lebih baik. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kehilangan pekerjaan sejak tahun 1999-2002: bisnis telah berpindah ke pasar tenaga kerja yang lebih murah seperti Cina, Kamboja, dan Vietnam. Industri semacam itu telah absen dari kekuatan industri untuk beberapa waktu sekarang, didorong ke tempat lain oleh iklim hukum dan politik proteksionis yang lazim di sana.

Menciptakan pasar tenaga kerja di mana melakukan bisnis itu mudah adalah hal yang sangat penting. Pembuat kebijakan di Indonesia telah mempersulit bisnis untuk diluncurkan di negara tersebut dan beroperasi di sana, dengan proses persetujuan pemerintah yang panjang, biaya tinggi, dan waktu administrasi yang lama. Merupakan penghalang utama untuk membangun lingkungan kerja berkualitas tinggi. Bank Dunia dan International Finance Corporation (IFC) menerbitkan laporan tahunan yang memeringkat kemudahan berbagai negara untuk mendirikan toko, dan pada tahun 2014, Indonesia menempati peringkat 120 dari 189 dalam kategori ini. Ini menunjukkan betapa sulitnya memulai bisnis di Indonesia. Selain itu, bisnis start-up memiliki biaya startup yang relatif tinggi dan tunduk pada peraturan wajib setoran minimum (cadangan). Oleh karena itu, Indonesia menempati urutan 175 dari 189 negara dalam hal kemudahan memulai usaha. Permasalahan seperti ini tentunya menghambat upaya penurunan angka pembunuhan di Indonesia.

Fleksibilitas pasar tenaga kerja Indonesia dipengaruhi oleh tiga kebijakan: yang berkaitan dengan keselamatan kerja, upah minimum, dan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (PHK) (Dzaelani, 2004). Permintaan tenaga kerja di dunia usaha, ketersediaan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi semuanya akan sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan ini

1. kebijakan keamanan tempat kerja (pekerja kontrak dan outsourcing). Perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan kebijakan ini, tetapi dalam konteks lain, hal tersebut dapat menimbulkan komplikasi hukum terkait hak karyawan saat bekerja dari jarak jauh atau di bawah kontrak, sehingga memerlukan penerapan yang tepat perlindungan. Merupakan praktik umum untuk menemukan pekerja outsourcing yang kemudian dialihdayakan lagi dan dilacak sampai tiga tingkatan gaji di bawah norma berdampak pada rendahnya upah yang mereka terima. Bahkan bentuk outsourcing yang lebih ketat sering bertentangan dengan peraturan pemerintah.
2. Kebijakan Pengambilan Keputusan (PHK) di Tempat Kerja. Hal ini berkaitan dengan praktik pemberian gratifikasi kepada karyawan. Perusahaan yang menerapkan aturan yang tidak mencerminkan kenyataan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat tidak efisien. Untuk memangkas biaya dalam PHK, perusahaan seringkali menyatakan bangkrut dan menghentikan operasinya daripada membayar paket pesangon yang besar kepada karyawan yang diberhentikan (World Bank, 2010). Hal ini terjadi sebagai akibat langsung dari kelemahan dalam undang-undang ketenagakerjaan

Indonesia mengenai perekrutan dan praktik perekrutan. Karena itu, lebih sedikit investor dan pengusaha yang tertarik untuk memulai bisnis baru atau mempekerjakan lebih banyak orang.

3. Tindakan disipliner minimum wajib. Masalah penegakan hukum upah minimum juga memperumit upaya untuk mengurangi kejahatan di Indonesia. Satu sisi menaikkan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, sementara sisi lain mematahkan semangat pengusaha dan menurunkan daya saing, terutama di industri padat karya. Penelitian Bank Dunia (2014) menemukan bahwa PDB riil tumbuh sebesar 21,3% antara tahun 2001 dan 2012, sementara PDB nominal tumbuh sebesar 175,8% dalam rentang waktu yang sama. Hal ini sebagai akibat dari meningkatnya inflasi di Indonesia yang mendorong para pekerja untuk menuntut kenaikan gaji guna mempertahankan taraf hidup mereka

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, permasalahan setengah pengangguran dan pengangguran di Indonesia disikapi melalui harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter, pengembangan usaha mikro dan kecil yang mandiri, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah pusat, pemerintah dan pemerintah provinsi dan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida. 2008. *Educations and skill mismatch*, World Bank Office Jakarta. Mimeo
- Drs. Tjokroamidjojo, Bintoro. M.A. 1976. *Analisa Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*. Majalah Administrator.
- Drs. Islamy, M. Irfan, MPA. 1988. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Guntur, agus, 2004. *Sambutan kepala dinastena kerja provinsi jawa timur dalam laporan pelaksanaan lokakarya kebijakan pasar tenaga kerja dan hubungan industrial untuk memperluas kesempatan kerja*, Lembaga Penelitian SMERU
- Jawa Pos. Kamis 27 Maret, 2008. *Atasi pengangguran, Butuh Sinergi*, Hlm. 9.
- Jawa Pos. Kamis 27 Maret, 2008. *Atasi pengangguran, Butuh Sinergi*, Hlm. 9.
- KPPOD, 2013. *Kesejahteraan buruh dan daya saing perusahaan*, KPPOD Brief Edisi maret April 2013
- Permenakerstrans No.14 Tahun 2015. *Rencanan Strategis Kementrian Ketenaga kerjaan 2015-2019*
- Undang Undang No.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenaga kerjaan* World Bank IFC 2012. *Doing Bussines di Indonesia 2012*. *Membandingkan kebijakan usaha di 20 kota dan 183 perekonomian*
- Yustika, Ahmad Erani, 2006. *Ekonomi kelembagaan defisi, teori dan strategi*. Malang; Bayu Media

- Zulhanto Aan.Dkk (2014) Under utilization di Indonesia dan Problematika ketenaga kerjaan lainnya di Indonesia, FEB.UNPAD
- Arifianto, Alex; Marianti, Ruly; Budiyati, Sri. 2005. Menyediakan Layanan Efektif bagi Kaum Miskin di Indonesia: Laporan Mekanisme Pembiayaan Kesehatan (JPK-GAKIN) di Kabupaten Tabanan, Bali: Sebuah Studi Kasus. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta
- BAPENAS, 2007. Kumpulan Bahan Pelatihan. Pemantauan dan Evaluasi Program Program Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Sosial Sulawesi Selatan Tahun 2007. Bappeda Sulsel dan BPS Sulsel, Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2007. Analisis Sensus Ekonomi 2006 Mengenai Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan (Hasil Sensus Sampel 2007). BPS Sulsel, Makassar.
- Sukirno, Sadono. 1981. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Lembaga Penerbitan Universitas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alisjahbana, Armida. 2008. Educations and skill mismatch, World bank Office Jakarta. Mimeo
- Drs. Tjokroamidjojo, Bintoro. M.A. 1976. Analisa Kebijakan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional. Majalah Administrator.
- Drs. Islamy, M. Irfan, MPA. 1988. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Guntur, agus, 2004. Sambutan kepala dinas tenaga kerja provinsi jawa timur dalam laporan pelaksanaan lokakarya kebijakan pasar tenaga kerja dan hubungan industrial untuk memperluas kesempatan kerja, Lembaga Penelitian SMERU